

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pendidikan dalam konteks pembangunan suatu bangsa yang baru merdeka merupakan fondasi utama yang lebih dari sekadar membagi pengetahuan. Pendidikan dijadikan sebagai proses kultural sekaligus politis untuk membentuk karakter manusia yang diinginkan. Bahkan zaman penjajahan pun rakyat Indonesia dijadikan target pembentukan karakter yang seharusnya menurut sudut pandang penjajah. Hal ini membuat pendidikan menjadi ruang yang semakin kompleks dan tidak netral.

Pendidikan dalam konteks penelitian ini tidak dimaknai sebagai pendidikan formal yang berfokus pada kurikulum atau proses pembelajaran di dalam kelas, melainkan sebagai pendidikan nonformal yang berperan dalam pembentukan karakter warga negara. Pendidikan dipahami sebagai upaya mengarahkan warga negara agar memiliki karakter yang mendukung pembangunan bangsa. Dalam proses tersebut, maka muncul dinamika tarik-menarik gagasan di antara para pendiri bangsa mengenai arah pembentukan karakter dan tipe warga negara Indonesia yang dicita-citakan.

Penelitian ini akan fokus pada pendidikan kewarganegaraan yang mewadahi poin-poin penting penelitian ini. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal yang membentuk karakter individu melalui pemahaman tentang nilai-nilai, peranan, sistem, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan (Izma & Kesuma, 2019). Esensi dari pendidikan kewarganegaraan ialah menanamkan nilai-nilai karakter pada warga negara untuk berperan sebagai subjek pembangunan bangsa.

Dalam penelitian ini, pendidikan kewarganegaraan dipahami sebagai proses pendidikan politik yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran kebangsaan, karakter demokratis, dan pemahaman mengenai peran serta tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks tersebut, ruang publik berfungsi sebagai tempat membentuk, mendiskusikan dan membagikan gagasan mengenai cita-cita pembentukan warga

negara. Pendidikan kewarganegaraan mampu membangun dan mengembangkan karakter supaya mampu berkontribusi membangun bangsa dan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir maupun bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Izma & Kesuma, 2019).

Pendidikan menjadi arena di mana ide-ide tentang rakyat Indonesia dan karakter kebangsaan disebarkan melalui berbagai media seperti pidato kebangsaan, buku, kurikulum, kebijakan publik hingga organisasi pelajar dan mahasiswa. Pada penelitian ini, pendidikan dipahami sebagai arena kontestasi. Kontestasi dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai tarik menarik dua macam gagasan terkait warga negara.

Kontestasi tidak dimaknai semata mata sebagai konflik langsung atau pertentangan personal antara Hatta dan Soekarno. Kontestasi dimaknai sebagai proses persaingan gagasan untuk memengaruhi arah pembentukan warga negara Indonesia pada masa pascakedaulatan. Kontestasi ini terjadi karena kedua bapak bangsa, Hatta dan Soekarno sama-sama berupaya memengaruhi arah pembentukan karakter kebangsaan yang ideal menurut mereka.

Kontestasi gagasan pendidikan ini menarik karena perbedaan gagasan Hatta dan Soekarno tidak berdiri pada oposisi yang keras, tetapi menunjukkan dua pendekatan berbeda dalam mengartikuluskannya di ruang publik. Perbedaan pemikiran Hatta dan Soekarno tercermin dalam gagasan pendidikan kewarganegaraan yang mereka kembangkan. Selain itu disertai pula berbagai respons dan perdebatan yang muncul di tengah masyarakat pada periode 1949–1965.

Hatta menekankan pembentukan warga negara yang mandiri, berpikir rasional, demokratis, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di sisi lain, Soekarno menempatkan pembentukan warga negara yang revolusioner, disiplin dan memiliki loyalitas politik. Hal ini sebagai sarana membangun persatuan nasional dan semangat revolusi di tengah masyarakat (Feith & Castles, 1988).

Meskipun perbedaan pemikiran keduanya telah berkembang sejak masa pergerakan nasional. Penelitian ini berpendapat bahwa kontestasi mengenai pembentukan warga negara baru memperoleh ruang yang lebih nyata sejak tahun

1949. Pada periode sebelumnya terpusat pada perjuangan kemerdekaan dan pembebasan bangsa dari kolonialisme. Sebaliknya, pada masa pascapengakuan kedaulatan, fokus pemikiran keduanya bergeser mengenai karakter dan bentuk warga negara yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

Pemikiran idealis keduanya dibahas dan diperdebatkan oleh berbagai lapisan masyarakat seperti guru, mahasiswa, tokoh politik dan masyarakat sipil. Penelitian ini digunakan untuk menafsirkan gagasan pendidikan kewarganegaraan Hatta dan Soekarno bukan sebagai kebijakan birokratik. Hatta dan Soekarno sama-sama memandang pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membangun warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun melalui pendekatan yang berbeda.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi perangkat kebangsaan yang menggugah kesadaran sebagai warga negara dan membentuk pemahaman tentang jati diri kebangsaan. Kesadaran tersebut dipahami sebagai kesadaran kebangsaan, yaitu kesadaran individu terhadap peran, tanggung jawab, dan posisinya dalam kehidupan berbangsa, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kolektivitas nasional.

Bagi Hatta pendidikan merupakan alat pembebasan moral dan sosial. Proses membentuk manusia yang rasional, bertanggung jawab dan mandiri (*self-help*), bahkan secara ekonomi. Ia menempatkan pendidikan dalam kerangka demokrasi sosial di mana warga negara belajar untuk hidup bersama secara adil dan saling tolong menolong (Hatta, 2014). Hatta menampilkan pendidikan sebagai ruang membangun kesadaran nasional (Farida Swasono, 2002). Di mana nilai-nilai moral dan sosial bangsa tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas (*bottom to top*).

Sementara itu, Soekarno memandang bahwa pendidikan sebagai alat pembangunan bangsa atau ia sering sebut dalam pidatonya adalah *nation-building* dan semangat gotong royong (Soekarno, 1965). Gagasannya berpijak pada keyakinan bahwa pendidikan harus menanamkan benih disiplin perjuangan menuju loyalitas politik. Soekarno berusaha menjadikan pendidikan sebagai wahana penggerak kesadaran kolektif melalui wacana "*Nation-Building*" hingga "*Manipol-USDEK*" (Soekarno, 1965).

Gagasan Hatta dan Soekarno tidak lahir dalam ruang hampa. Pemikiran keduanya dipengaruhi oleh latar sosial dan pengalaman politik yang berbeda. Perbedaan pengalaman tersebut turut membentuk cara pandang mereka terhadap pendidikan dan pembangunan bangsa.

Soekarno banyak beraktivitas di pusat pergerakan politik di Jawa. Kedekatannya dengan dinamika massa dan gerakan nasional memengaruhi corak pemikirannya. Hal ini terlihat dari gagasan Soekarno yang lebih menekankan persatuan nasional dan mobilisasi massa dalam perjuangan kebangsaan.

Sementara itu, Hatta memiliki pengalaman intelektual dan organisasi yang berbeda. Latar Minangkabau serta keterlibatannya dalam pendidikan modern membentuk pemikiran yang lebih rasional dan demokratis. Oleh karena itu, Hatta lebih menekankan pentingnya pendidikan politik, partisipasi masyarakat, dan kesadaran individu dalam kehidupan berbangsa.

Penelitian kontestasi gagasan pendidikan kewarganegaraan dimulai dari pembahasan Hatta baru Soekarno. Penulisan tidak mengikuti kebiasaan umum yang menempatkan Soekarno lebih dahulu tetapi karena pertimbangan historis dan metodologi. Dalam periode 1949–1955, Hatta justru menjadi figur yang lebih dominan dalam merumuskan arah dasar kehidupan bernegara. Bahkan, fondasi pemikiran liberal-demokratis Indonesia pada masa itu dipengaruhi oleh gagasan Hatta, bukan Soekarno.

Oleh karena itu, penulisan mengurutkan sesuai dengan kronologi kemunculan pengaruh ide mereka terkait warga negara. Dengan demikian, penulisan “Hatta–Soekarno” mencerminkan dinamika historis atas gagasan mereka dalam rentang tahun 1949-1965. Hatta dan Soekarno bukan sekadar tokoh pendiri bangsa dan tokoh politis tetapi tokoh intelektual yang menggemborkan visi berbeda tentang rakyat Indonesia.

Kajian ini berusaha memperlihatkan bagaimana gagasan pendidikan kewarganegaraan sejak 1949 berkembang melalui perbedaan pemikiran antara Hatta dan Soekarno. Perbedaan tersebut membentuk dinamika dan kontestasi gagasan dalam arena pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan pada periode 1949-1965 menjadi ruang pertemuan sekaligus pertarungan gagasan kedua tokoh dalam membentuk karakter kebangsaan Indonesia.

Kontestasi gagasan tersebut juga memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian kelompok mendukung gagasan yang dianggap sesuai dengan arah politik dan tujuan pendidikan nasional pada masanya. Namun, terdapat pula kelompok yang memberikan kritik dan penolakan terhadap gagasan pendidikan yang berkembang. Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pada periode tersebut tidak bersifat netral, melainkan menjadi bagian dari dinamika politik dan ideologi negara.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang signifikan baik secara tematik maupun metodologi. Secara tematik, belum ada kajian yang secara khusus menelaah pendidikan kewarganegaraan dalam rentang tahun 1949-1965 sebagai arena kontestasi gagasan antara Hatta dan Soekarno. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas aspek politik kenegaraan, ekonomi, atau ideologi besar negara tanpa menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai ruang intelektual yang otonom dan dinamis.

Pada periode inilah arah pembentukan rakyat Indonesia sedang dirumuskan secara intensif di tengah fragmentasi politik. Sebagai contoh, penelitian Lamia Rozianna Putri (2024) berfokus pada respons Soekarno terhadap ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal serta gagasannya mengenai Nasakom, Konsepsi Presiden, dan Dekrit 1959. Penelitian Kalistus Stefen et al., (2022) yang berfokus pada pandangan politik Hatta mengenai demokrasi ekonomi dan sistem koperasi. Begitu pula penelitian Ketut (2020) membahas pelaksanaan sistem Demokrasi Liberal di Indonesia dan dinamika pemilihan umum pertama tahun 1955 sebagai pencapaian politik utama pada periode tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi celah kajian dengan membaca gagasan pendidikan kewarganegaraan Hatta dan Soekarno secara bersamaan dalam konteks perubahan politik Indonesia dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin. Fokus pada periode 1949-1965 menjadi penting karena masa ini menandai transisi politik pascapengakuan kedaulatan. Pada periode ini negara dan warga negara sedang mengarahkan makna kewarganegaraan dalam suasana ideologis yang belum stabil.

Secara metodologi, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif sejarah intelektual yang memandang gagasan bukan sebagai hasil akhir

dari kebijakan. Sejarah intelektual memberi pemahaman bahwa ide merupakan hal yang hidup dan bergerak melalui berbagai media, berinteraksi dengan audiens yang dituju dan menghasilkan efek sosial dalam jangka pendek ataupun panjang.

Penelitian tidak hanya membahas isi pemikiran Hatta dan Soekarno, tetapi juga menelusuri bagaimana hidupnya ide-ide mereka dalam masyarakat. Menjawab bagaimana gagasan itu dibentuk, didiskusikan dan disebarkan. Setelah itu, diikuti dengan penerimaan, atau penolakan dalam latar 1949-1965 yang penuh dengan dinamika. Penelitian ini merupakan upaya membaca pendidikan sebagai arena kontestasi akan makna tentang warga negara dan kebangsaan di Indonesia pada masa pascapengakuan kedaulatan.

Penelusuran terhadap keempat pilar tersebut akan dibantu dengan menggunakan kerangka pemikiran Paulo Freire dan Antonio Gramsci secara retrospektif. Keduanya tidak diperlakukan sebagai teori utama yang digunakan langsung oleh Hatta dan Soekarno, melainkan sebagai alat bantu analisis untuk membaca bagaimana gagasan pendidikan kedua tokoh itu bekerja di dalam masyarakat. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berkontribusi memperluas cara pandang terhadap sejarah pembentukan kewarganegaraan Indonesia.

Kedua teori dan perspektif sejarah intelektual akan menafsir ulang dinamika gagasan dua tokoh pendiri bangsa dalam konteks yang lebih reflektif yaitu, membentuk kewarganegaraan dan menggugah bangsa melalui kontestasi gagasan pendidikan Hatta dan Soekarno tahun 1949-1965.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada periode 1949-1965. Tahun 1949 dipilih sebagai titik awal pembahasan karena merupakan masa pascapengakuan kedaulatan. Tahun 1949 juga tidak diartikan sebagai awal lahirnya gagasan Hatta dan Soekarno terkait pembentukan karakter kewarganegaraan. Namun, karena setelah pengakuan kedaulatan persoalan bangsa bergeser dari perjuangan merebut kemerdekaan menjadi pembentukan warga negara dalam bentuk negara yang berdaulat.

Gagasan keduanya memperoleh ruang dalam penyebaran pengaruh

gagasan yang signifikan di ruang publik. Sementara itu, tahun 1965 dipilih sebagai batas akhir karena perubahan rezim politik dengan munculnya Orde Baru yang menutup arena kontestasi antara Hatta dan Soekarno. Namun, tidak diartikan sebagai akhir dari hidupnya gagasan Hatta dan Soekarno. Sejak munculnya Orde Baru, gagasan Hatta dan Soekarno tidak lagi berkontestasi dalam konfigurasi Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, melainkan memasuki fase warisan, seleksi, pemaknaan ulang, dan pelembagaan baru dalam konteks rezim yang berbeda.

Pergeseran kekuasaan setelah 1965 menandai berakhirnya dinamika perdebatan mengenai arah pendidikan kewarganegaraan yang sebelumnya berlangsung intens pada masa Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian, periode 1949-1965 tetap menjadi periode utama penelitian karena pada masa ini Hatta dan Soekarno berkontestasi. Terutama dalam konteks Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin terkait gagasan kewarganegaraan.

2. Rumusan Masalah

Merujuk pada dasar pemikiran yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan menjadi arena kontestasi gagasan kewarganegaraan antara Hatta dan Soekarno pada periode 1949-1965?
2. Bagaimana gagasan kewarganegaraan disebarkan, diterima dan bertransformasi dalam pembentukan relasi antara negara dan warga negara pada periode 1949-1965?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pendidikan dijadikan sebagai arena kontestasi gagasan kewarganegaraan antara Hatta dan Soekarno pada periode 1949-1965
2. Menganalisis bagaimana gagasan kewarganegaraan dirumuskan, disebarkan, diterima dan bertransformasi dalam pembentukan relasi antara negara dan warga negara pada periode 1949 – 1965

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah intelektual di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika gagasan pendidikan sebagai arena kontestasi ide kewarganegaraan. Melalui perspektif sejarah intelektual, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya dapat dibaca sebagai kebijakan formal negara.

Pendidikan dijadikan sebagai ruang mendidik warga negara. Tempat gagasan dan nilai-nilai kebangsaan dibentuk, diperdebatkan, serta diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pembahasan akademik tentang hubungan antara pemikiran politik, moral, dan pendidikan pada masa pascapengakuan kedaulatan, sekaligus membuka ruang baru bagi analisis ide-ide pendidikan Indonesia di luar kerangka birokratik dan administratif.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pertimbangan bagi pendidik, peneliti, maupun pembuat kebijakan pendidikan dalam memahami akar historis dari gagasan pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Dengan menelusuri kontestasi gagasan antara Hatta dan Soekarno, penelitian ini diharapkan membantu memperkuat kesadaran kritis.

Suatu perjalanan historis tentang bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan, moral sosial, dan karakter kebangsaan terbentuk dalam perjalanan sejarah pembentukan kewarganegaraan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kurikulum, bahan ajar, atau kegiatan pendidikan yang menempatkan pendidikan bukan sekadar sarana membagi pengetahuan, tetapi juga pembentukan individu yang kritis.

D. Kerangka Analisis

1. Pendidikan sebagai Pembentukan Kesadaran Warga Negara

Teori pendidikan kritis Paulo Freire memandang pendidikan sebagai proses pembebasan yang bertujuan membentuk kesadaran kritis melalui refleksi dan

tindakan (praksis) (Freire, 1970). Dalam pandangan ini, pendidikan tidak sekadar membagi pengetahuan, tetapi berfungsi sebagai sarana memanusiakan individu melalui proses dialogis yang mendorong keterlibatan aktif dalam memahami realitas sosial.

Dalam penelitian ini, pemikiran Freire digunakan untuk membaca dimensi pedagogis dalam gagasan pendidikan Hatta dan Soekarno, khususnya dalam memahami bagaimana pendidikan diposisikan sebagai proses pembentukan kesadaran warga negara. Melalui kerangka ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sistem pengajaran, tetapi sebagai proses yang membentuk nilai, orientasi berpikir, dan kesadaran kebangsaan.

2. Kontestasi Gagasan dalam Ruang Sosial

Teori Antonio Gramsci digunakan untuk memahami bagaimana gagasan pendidikan beroperasi dalam ruang sosial. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui negara, tetapi juga melalui pertarungan ide dan nilai dalam masyarakat sipil yang berlangsung melalui proses penyebaran, penerimaan, dan perdebatan gagasan (Gramsci, 1992).

Dalam penelitian ini, teori Gramsci digunakan secara retrospektif untuk membaca dinamika kontestasi gagasan pendidikan antara Hatta dan Soekarno, khususnya dalam melihat bagaimana gagasan tersebut bergerak, diperdebatkan, dan diterima secara beragam di ruang publik. Penggunaan teori ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan dominasi gagasan yang utuh, melainkan untuk memahami proses tarik-menarik gagasan dalam membentuk arah pemikiran masyarakat.

3. Sejarah Intelektual sebagai Pergerakan Gagasan

Perspektif sejarah intelektual ini berdiri berbeda dari teori Gramsci maupun Freire. Teori memberikan perangkat konseptual tertentu untuk menamai mekanisme sosial, maka perspektif sejarah intelektual berfungsi sebagai sudut pandang analitis untuk membaca bagaimana gagasan bekerja dalam konteks periodenya. Perspektif sejarah intelektual secara khusus memiliki karakter yang berbeda dari teori Gramsci maupun Freire, yaitu penekanannya pada “Afterlife” suatu gagasan.

Analisis menggunakan perspektif sejarah intelektual dalam penelitian ini disusun berdasarkan empat pilar. *Pertama*, mengidentifikasi inti gagasan

pendidikan Hatta dan Soekarno, termasuk nilai, asumsi dasar, dan konteks sosial yang memunculkannya. *Kedua*, menelusuri bagaimana ide-ide itu disebarkan melalui media.

Ketiga, menelusuri jejak penerimaan, penyesuaian, atau respons masyarakat terhadap gagasan tersebut dalam ruang pendidikan, organisasi, media, dan kebijakan. Merujuk pada nilai-nilai transformatif dan menjelaskan resistensi atau adaptasi muncul terhadap ide ini. Dengan melihat apakah muncul nilai baru di masyarakat.

Keempat, menelusuri jejak dan keberlanjutan gagasan setelah periode 1965, baik dalam kebijakan, ingatan publik, dan wacana pendidikan nasional serta menghidupkan kembali gagasan dari kedua tokoh. Adapun pendekatan sejarah intelektual digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelusuri perkembangan dan transformasi gagasan dalam konteks sejarahnya

4. Konsep Kontestasi dan Kontestasi Gagasan

Kontestasi dalam penelitian ini merupakan proses persaingan gagasan untuk mempengaruhi arah pembentukan warga negara pada masa pascakedaulatan. Kontestasi tidak dipahami sebagai konflik langsung atau pertentangan personal antara Hatta dan Soekarno. Selain itu penelitian ini tidak hanya berfokus pada isi pemikiran masing masing, tetapi bagaimana gagasan ini disebarkan, diperdebatkan, diterima, ditolak dan bertransformasi dalam ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya sekadar perbedaan gagasan, tetapi kontestasi gagasan.

Adapun indikator historis yang digunakan untuk memperlihatkan kontestasi ini ialah, adanya media penyebaran seperti pidato, buku, dan surat kabar. Terdapat pula respons sebagai bentuk penerimaan atau penolakan terhadap gagasan keduanya. Konsep kontestasi ini akan didukung dengan teori Gramsci sebagai alat bantu untuk menjelaskan bagaimana gagasan memperoleh pengaruh, diperebutkan dalam ruang sosial dan membentuk kesadaran kolektif di masyarakat.

E. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mencakup lima tahap utama, yaitu

pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah) (Kuntowijoyo, 1994).

Tahapan pertama, pemilihan topik, dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa penelitian tentang Hatta dan Soekarno yang umumnya lebih menyoroti aspek politik dan ekonomi. Sementara itu, dimensi pendidikan sebagai arena kontestasi gagasan para pendiri bangsa masih belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pendidikan menjadi arena kontestasi ide antara Hatta dan Soekarno dalam membentuk karakter kewarganegaraan dan kesadaran kebangsaan Indonesia pascapengakuan kedaulatan.

Tahapan kedua adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini, peneliti melakukan penelusuran dan pengumpulan sumber primer dan sekunder melalui beberapa perpustakaan dan platform digital. Peneliti mengakses koleksi buku dan karya asli Hatta dan Soekarno melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perpustakaan UNJ, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan SMAN 1 Jakarta. Selain sumber cetak, peneliti juga mengumpulkan jurnal dan artikel ilmiah dari berbagai portal daring untuk melengkapi konteks teoritis dan mendukung analisis. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan komprehensif, kredibel, dan relevan dengan fokus penelitian.

Tahapan ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan dengan memeriksa asal-usul, tahun penerbitan, serta konteks kemunculan sumber. Meskipun sumber diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah melalui proses verifikasi kelembagaan, kritik ekstern tetap dilakukan untuk memastikan keaslian dan konteks dokumen.

Kritik intern dilakukan untuk menilai isi, konsistensi argumen, dan kecenderungan penulis dalam sumber yang digunakan. Dengan membandingkan sejumlah sumber untuk melihat keselarasan dan perbedaan penafsiran terhadap gagasan kedua tokoh. Misalnya, membandingkan pembahasan dalam buku *Pemikiran Politik Indonesia 1945– 1965* karya Herbert Feith dan Lance Castles dengan *Mohammad Hatta: Biografi Politik* karya Deliar Noer, yang sama-sama

menyinggung konsep “*The right man in the right place*” yang tidak tercermin dalam parlemen. Perbandingan ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan menilai bagaimana masing-masing penulis menempatkan konsep tersebut dalam konteks sejarah dan pemikiran Hatta.

Tahapan keempat adalah interpretasi, dilakukan untuk menafsirkan makna gagasan Hatta dan Soekarno dari membandingkan isi sumber, termasuk perbandingan antara Herbert Feith, *Pemikiran Politik Indonesia 1945–1965*, hlm. 81 dan Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, hlm. 411. Dari penjelasan Hatta mengenai “*The right man in the right place*”, dapat ditafsirkan bahwa kritik tersebut berkaitan dengan anggota anggota parlemen yang tidak memiliki kapabilitas untuk duduk dalam parlemen. Hal ini sebagai sebab kurangnya pendidikan politik untuk rakyat Indonesia.

Tahapan kelima adalah historiografi, yaitu proses menyusun hasil analisis ke dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis, logis, dan argumentatif. Pada tahap ini, data dan temuan dari proses heuristik, verifikasi, dan interpretasi diorganisasikan menjadi narasi yang menjelaskan perkembangan dan kontestasi gagasan pendidikan kewarganegaraan Hatta dan Soekarno dalam konteks politik Indonesia 1949-1965.

2. Bahan Sumber

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri atas karya-karya asli kedua tokoh. Dari pihak Hatta yaitu, *Demokrasi Kita* (Bandung: Segi Arsy, 2014), *Menuju Gerbang Kemerdekaan: Sebuah Otobiografi* (Kompas, 2011), dan *Berjuang dan Dibuang* (Kompas, 2011) karya Mohammad Hatta. Dari pihak Soekarno, penelitian ini menggunakan buku *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid I (1959) dan Jilid II (1965) yang diterbitkan Panitia Penerbit DBR, serta *Autobiography as Told to Cindy Adams* (1965). Karya-karya tersebut digunakan untuk mengkaji substansi gagasan pendidikan, demokrasi, kewarganegaraan, dan pembentukan karakter bangsa dari perspektif kedua tokoh.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pidato dan tulisan politik sebagai sumber primer untuk melihat bagaimana gagasan tersebut diartikulasikan dan disampaikan kepada publik. Surat kabar dan media sezaman digunakan untuk

menelusuri sirkulasi gagasan, respons masyarakat, dan dinamika perdebatan publik pada periode 1949-1965. Sementara itu, arsip dan dokumen kelembagaan, seperti Seri *Pribadi Manusia Hatta* Jilid 7 dan 9 (Yayasan Hatta, 2002), digunakan untuk memahami konteks sosial, persepsi sezaman, dan ruang penyebaran gagasan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur yang memberikan konteks tambahan dan pembacaan kontemporer. Sumber-sumber ini digunakan untuk membantu memetakan konteks gagasan, membandingkan penafsiran, dan memperkuat analisis terhadap perkembangan dan konsistensi gagasan kedua tokoh.

Tabel 1. 1 Sumber primer dan sekunder

JENIS SUMBER	CONTOH SUMBER	FUNGSI DALAM SKRIPSI
Karya Hatta	Demokrasi Kita, Menuju Gerbang Kemerdekaan: Sebuah Otobiografi, Berjuang dan Dibuang, dan Ekonomi Terpimpin.	Membaca gagasan Hatta terkait demokrasi, rasionalitas, kemandirian (<i>self-help</i>) dan warga negara.
Karya/Pidato Soekarno	Dibawah Bendera Revolusi Jilid I & II, Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka dan Soekarno: <i>An Autobiography as Told to Cindy Adams</i> .	Membaca gagasan Soekarno terkait <i>nation-building</i> , revolusi, kekuatan massa dan warga negara.
Arsip melalui ANRI	Resolusi I & II Taman Siswa 1951, Surat oleh M. Said 1950, Surat PKI & PSII kepada Hatta-Soekarno.	Membaca respon masyarakat/organisasi terhadap wacana pendidikan nasional dan latar konteks politik
Media Sezaman	<i>Bintang Timur</i> edisi Maret 1955, <i>De Preangerbode</i> edisi Juni 1957, <i>Merdeka</i> edisi September 1963.	Membaca siklus penerimaan dan penyebaran gagasan dalam media massa

Sumber Sekunder	Pemikiran Politik Indonesia 1945–1965, Pribadi Manusia Hatta dan Tragedi Bung Karno: Perjalanan Terakhir Seorang Proklamator	Memberi konteks politik dan historiografis
-----------------	--	--

